



Siaran Pers
Parlemen Nasional
17 Maret 2015

**Kejaksaan Umum meminta Parlemen Nasional mengamandemen
KUHP agar mempidanakan inses tanpa mempersoalkan persetujuan
korban**

Pada tanggal 6 Maret 2015, Kejaksaan Umum menyampaikan laporan tahunan 2014 dan juga rencana kerja 2015 ke sidang pleno Parlemen Nasional (PN). Laporan tersebut disampaikan oleh Jaksa Agung, Jose Ximenes bersama dengan rombongannya.

Dalam presentasi laporan tersebut, Kejaksaan melaporkan mengenai hasil kerja, hambatan dan tantangan yang dihadapi pada tahun 2014 dan rencana kerja untuk tahun 2015. Dalam presentasi tersebut, Kejaksaan juga meminta kepada PN untuk segera mendiskusikan dan mengesahkan undang-undang mengenai organisasi yudisial, undang-undang mengenai peradilan anak dan mengamandemen Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) untuk mengkriminalisasikan inses.

Permohonan dari Kejaksaan tersebut sejalan dengan upaya JSMP selama ini, melalui laporan mengenai kasus inses di Timor-Leste pada tahun 2012, debat publik dengan para mahasiswa dan seminar nasional lainnya.

Pada saat ini JSMP dan ALFeLA sedang mempersiapkan sebuah usulan perubahan kepada PN mengenai “Memperbaiki KUHP untuk melindungi lebih baik perempuan dan anak-anak di Timor-Leste.” JSMP, ALFeLA dan organisasi non pemerintah lainnya sedang berupaya untuk bertemu dengan Parlemen Nasional dan institusi-institusi Negara relevan lainnya untuk mendiskusikan mengenai usulan tersebut.

Banyak kasus inses yang dibebaskan dan para korban tidak mendapatkan keadilan karena alasan persetujuan (consent). Kasus-kasus yang melibatkan anak di bawah umur juga sulit bagi pengadilan untuk memproses dan mengambil putusan yang layak karena tidak ada undang-undang mengenai peradilan anak.

“JSMP berhadap PN dapat mempertimbangkan dan memprioritaskan

undang-undang yang diusulkan oleh Kejaksaan untuk segera didiskusikan dan disahkan, agar dapat memperbaiki pekerjaan sektor peradilan dan dapat memberikan keadilan bagi korban kasus inces dan anak di bawah umur yang terlibat dalam tindak pidana bisa mendapatkan proses dan perlakuan yang layak dan memadai”, kata Direktur Eksekutif JSMP, Luis de Oliveira Sampaio.

Dalam laporan Kejaksaan menerangkan bahwa total kasus yang terdaftar selama tahun 2014 berjumlah 4.037 dan dari total kasus ini, 118 kasus yang telah diarsipkan. Jumlah kasus yang masih diproses pada tahun 2015 berjumlah 3.207 kasus.

Kejaksaan juga menempatkan seorang Jaksa untuk secara khusus menangani kasus-kasus yang melibatkan anak di bawah umur dan keluarga meskipun keterbatasan sumber daya manusia.

Jumlah Jaksa yang ditugaskan di 4 pengadilan distrik berjumlah 19 orang, 11 orang di Dili, 4 orang jaksa di Baucau, 3 orang jaksa di Suai dan 1 orang jaksa ditugaskan di Oe-Cusse.

Para wail rakyat dalam intervensi mereka sangat menghargai pekerjaan Kejaksaan dan mendorong untuk tetap menjalankan administrasi peradilan secara mandiri dan tanpa adanya diskriminasi bagi warga negara.

Untuk mendapatkan informasi lebih detail, silahkan hubungi:

Luis de Oliveira Sampaio
Direktur Eksekutif JSMP
Alamat e-mail: luis@jsmp.minihub.org
Telpone:3323883 | 77295795